

## **Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018**

**Irma Suryani**  
*STIE Gema Widya Bangsa*  
Irma.suryani02@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018\*). Sektor pemerintahan saat ini menganut sistem desentralisasi, dengan sistem desentralisasi pemerintah daerah diharapkan memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi (UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan), sedangkan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), menyatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah kota/kabupaten di Jawa Barat masih rendah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan deskriptif dengan pengujian hipotesis menggunakan Uji t. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018\*). Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018\*), apabila Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga akan mengalami peningkatan.

**Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

### **I. PENDAHULUAN**

Penerapan otonomi daerah yang tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk memiliki tingkat kemandirian keuangan yang tinggi dengan harapan akan semakin memperkecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Tujuan otonomi daerah antara lain menciptakan kemandirian, pendelegasian wewenang, menggali potensi sumber-sumber daya pemerintah daerah agar mapan secara keuangan. Tingginya tingkat kemandirian keuangan daerah bukan berarti pemerintah daerah sudah tidak perlu lagi memperoleh dana perimbangan karena dana perimbangan tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah. Kemandirian keuangan daerah yang baik akan meningkatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, meningkatkan investasi pembangunan jangka panjang, dan sebagainya.

Pelaksanaan otonomi daerah menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, sehingga Pemerintah daerah dituntut untuk selalu meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kualitas kinerja pemerintah daerah diukur dari pengelolaan APBD. Otonomi daerah dalam bentuk pengelolaan APBD dinyatakan bahwa sumber daya pemerintahan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam upaya pembangunan daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam merencanakan dan mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik berupa pendapatan pajak, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Dapat dikatakan bahwa semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat berupa dana perimbangan ke daerah semakin kecil. Kategori kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah menjelaskan bahwa Jika tingkat kemandirian suatu daerah memiliki kategori **rendah sekali** dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan pada pemerintah daerah. Kategori tingkat kemandirian **rendah** berarti campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Kategori **sedang** akan menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori **tinggi**, diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya. BPS (2017).

Fenomena yang terjadi pada Provinsi Jawa Barat terdapat 27 Kabupaten Kota yang terdiri dari 9 Kota dan 18 Kabupaten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat memiliki persentase yang masih relatif kecil sehingga menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota masih tinggi. Tingginya tingkat ketergantungan keuangan ini berarti kebutuhan pembiayaan pengeluaran Kabupaten/Kota sebagian besar masih didanai oleh dana perimbangan pemerintah pusat.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2014-2018\*”). Dengan Rumusan Masalah :Seberapa baik tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018\*).

## II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

### Kajian Pustaka

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pendapatan merupakan semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran, yang selanjutnya menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Klasifikasi pendapatan menurut PP No 71 tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pasal 1 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan cara rasio rumusan sebagai berikut (Mahmudi 2019; 141)

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan Rumus rasio efektivitas PAD suatu daerah memiliki tingkat efektivitas yang efektif jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan penerimaan PAD yang ditargetkan. Menurut Mahmudi 2019 rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan secara umum. Adapun nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Kategori Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Persentase Tingkat Efektivitas	Kategori
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2019)

Dana Perimbangan merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Transfer Umum, Dana Transfer Khusus (Siregar, 2017;82)

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Mahmudi (2019; 140) menjelaskan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah penerimaan PAD dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

**Tabel 2.2.**  
**Kategori Kemandirian Keuangan Daerah (PAD)**

Persentase Tingkat Efektivitas	Kategori
>75%	Tinggi
>50% - 75%	Sedang
>25% - 50%	Rendah
0 - 25%	Rendah Sekali

Sumber: Badan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

### Kerangka Pemikiran

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar dan kecilnya pendapatan asli daerah dibanding pendapatan yang berasal dari sumber lainnya seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah. Adapun bantuan dari pemerintah pusat bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

Saat ini APBD pemerintah daerah lebih banyak didasarkan pada aspek belanja dibandingkan upaya untuk memperhatikan kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah membutuhkan dana perimbangan yang lebih besar dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak berfokus pada upaya meningkatkan pendapatan asli daerah baik yang bersumber dari pajak, pendapatan retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Apabila kondisi ini terus terjadi akan menyebabkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat menjadi tinggi dan penerapan desentralisasi daerah menjadi tidak maksimal.

Menurut Mahardika dan Artini (2012) bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari sejauh mana ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana luar atau eksternal, dimana berdasarkan hasil penelitiannya di kabupaten Tabanan tahun 2007-2011 menunjukkan hasil kemandirian keuangan yang kurang sehingga dapat disimpulkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Senada dinyatakan oleh Saputra (2014) bahwa tingkat kemandirian di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2004-2011 menunjukkan hasil dengan kategori rendah sekali, dimana hasil penelitian ini didukung juga oleh Dwirandra (2007) yang menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2002-2006 cenderung menurun.

Hal berbeda dinyatakan oleh Ramdhani (2016) bahwa, tingkat kemandirian pada tingkat kemandirian kota Tarakan tahun 2010-2015 mengalami kecenderungan kearah positif

### Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir, hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini adalah: pendapatan asli daerah mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah pada kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018\*)

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan deskriptif dengan pengujian hipotesis menggunakan Uji t, dengan hipotesis statistik yaitu:

H<sub>0</sub>: Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah pada kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018\*)

H<sub>a</sub>: Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah pada kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018\*)

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan observasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemandirian keuangan daerah yang akan di ukur oleh proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap proporsi transfer pemerintah pusat ditambah pemerintah provinsi dan pinjaman. operasional variabel penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Tingkat kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retibusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah	$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$ <p>Sumber: (Mahmudi, 2019; 140)</p>	Rasio

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018\*) yang terdiri dari 8 Kota dan 19 Kabupaten, dengan teknik pengambilan sampel adalah teknik jenuh, dimana seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Populasi Penelitian**  
**Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat**

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Bogor	15	Kabupaten Karawang
2	Kabupaten Sukabumi	16	Kabupaten Bekasi
3	Kabupaten Cianjur	17	Kabupaten Bandung Barat
4	Kabupaten Bandung	18	Kabupaten Pangandaran
5	Kabupaten Garut	19	Kota Bogor
6	Kabupaten Tasikmalaya	20	Kota Sukabumi
7	Kabupaten Ciamis	21	Kota Bandung
8	Kabupaten Kuningan	22	Kota Cirebon
9	Kabupaten Cirebon	23	Kota Bekasi
10	Kabupaten Majalengka	24	Kota Depok
11	Kabupaten Sumedang	25	Kota Cimahi
12	Kabupaten Indramayu	26	Kota Tasikmalaya
13	Kabupaten Subang	27	Kota Banjar
14	Kabupaten Purwakarta		

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Penelitian Deskriptif

Pendapatan Asli Daerah pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018\*) disajikan dalam tabel 4.1, sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Rasio Kemandirian Keuangan**  
**Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2014-2018\*)**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2014	14.071.981.881,22
2015	16.053.210.661,32
2016	17.728.179.136,64
2017	22.439.986.899,42
2018*)	20.914.912.065,26

Sumber: Badan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

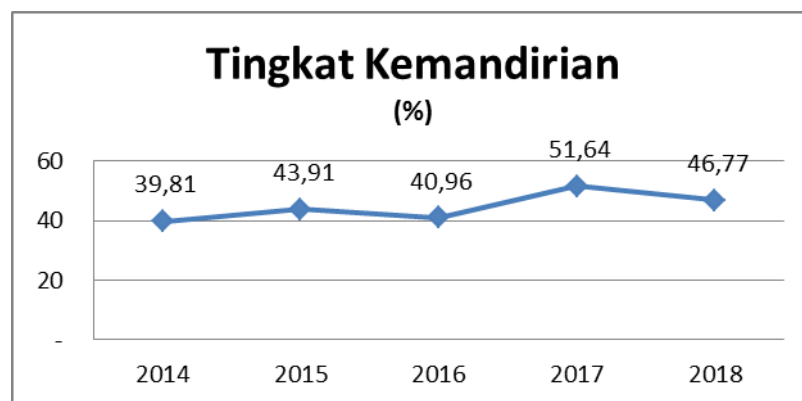
Berdasarkan data yang tersaji di dalam tabel terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 5 tahun mengalami kenaikan setiap tahunnya. Persentase kenaikan tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 sebesar 14,08%, tahun 2016 dibandingkan 2015 mengalami kenaikan sebesar 10,43%, tahun 2017 dibandingkan 2016 mengalami kenaikan sebesar 20,58%, dan 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar mengalami penurunan sebesar 6,79%. Penurunan PAD Tahun 2018 disebabkan karena data yang tersaji tahun 2018 adalah data semester 1 tahun 2018 dan apabila data tahun 2018 terjadi penuh untuk 1 tahun laporan diperkirakan juga mengalami peningkatan PAD.

Perkembangan tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama tahun 2014-2018\*) dijabarkan dalam tabel 4.2 dan gambar 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.2.**  
**Distribusi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**  
**Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2014-2018\*)**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Transfer Pusat +Provinsi+Pinjaman	% Tingkat Kemandirian
2014	14.071.981.881,22	35.344.852.099,61	39,81%
2015	16.053.210.661,32	36.556.735.769,43	43,91%
2016	17.728.179.136,64	43.277.778.096,62	40,96%
2017	22.439.986.899,42	43.451.828.314,82	51,64%
2018*)	20.914.912.065,26	44.717.678.257,13	46,77%
	Rata-rata		44,61%

Sumber: Badan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018



**Gambar 4.1.**  
**Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan**  
**Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2014-2018\*)**  
 Sumber: Diolah peneliti

Berdasarkan tabel 4.2. disajikan persentase tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018\*) juga mengalami kenaikan. Tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 4,1%, tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 2,95%, tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 10,68%, dan tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar 4,87%. Sesuai dengan data PAD sebelumnya penurunan persentase tingkat kemandirian keuangan daerah tahun 2018 disebabkan karena data yang tersaji *cut off* semester 1 tahun 2018. Rata-rata persentase tingkat kemandirian daerah terhadap 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2014 sampai dengan 2018\*) berada pada kategori rendah dengan nilai 44,61%.

Keterkaitan antara Pendapatan Asli Daerah dengan persentase tingkat kemandirian selama kurun waktu lima tahun (2014-2018\*) menunjukkan kenaikan PAD memiliki korelasi positif dengan persentase tingkat kemandirian keuangan daerah, dimana apabila Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan akan diikuti dengan kenaikan persentase tingkat kemandirian keuangan daerah.

#### Hasil Uji Hipotesis

Tabel *one sample statistics* di bawah menunjukkan nilai statistic deskriptif, yaitu  $N=5$  dapat diartikan jumlah sample yang digunakan adalah 5 tahun laporan dengan mean sebesar 44,6180 yang artinya nilai rata-rata hitung adalah 44,6180. Adapun hasil standar deviasi atau simpangan baku sebesar 4,76809 dan hasil standar error mean sebesar 2,13235.

**Tabel 4.3.  
Descriptives**

		Statistic	Std. Error	
Kemandirian	Mean	44.6180	2.13235	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	38.6976	
		Upper Bound	50.5384	
	5% Trimmed Mean	44.4950		
	Median	43.9100		
	Variance	22.735		
	Std. Deviation	4.76809		
	Minimum	39.81		
	Maximum	51.64		
	Range	11.83		
	Interquartile Range	8.82		
	Skewness	.752	.913	
	Kurtosis	-.342	2.000	

**Tabel 4.4.  
Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Kemandirian	.179	5	.200*	.944	5	.694

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

**Tabel 4.5.  
One-Sample Statistics**

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Kemandirian	5	44.6180	4.76809	2.13235

Berdasarkan tabel dibawah, dapat disimpulkan nilai t (t hitung) sebesar -14,248. Nilai df (*degree of freedom*) atau derajat kebebasan sebesar 4 dan nilai signifikansi sebesar 0,00.

**Tabel 4.6.  
One-Sample Test**

	Test Value = 75					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Kemandirian	-14.248	4	.000	-30.38200	-36.3024	-24.4616

Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi <0,05 yang artinya H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018\*).

### Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018\*) memiliki korelasi positif dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil uji deskriptif dimana, apabila Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga akan mengalami peningkatan. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan fenomena yang dikemukakan di latar belakang, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian dan hasil penelitian serta pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018\*) masuk dalam kategori "**Rendah**".
2. Pendapatan Asli daerah mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah dimana, ketika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian peneliti memberikan saran bahwa sistem desentralisasi menjadi salah satu tujuan dari pemerintahan saat ini. Upaya ini dapat tercapai apabila pemerintah daerah fokus pada upaya maksimal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga diharapkan tingkat kemandirian keuangan daerah juga akan terus mengalami peningkatan, sehingga secara bertahap pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk membiayai operasionalisasi pemerintahan daerah. Upaya peningkatan tersebut dilakukan dengan terus meningkatkan pendapatan pajak, pendapatan retribusi, lain-lain pendapatan sah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Siregar, Baldric. 2017. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah daerah Berbasis Akrual)*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. 2018. Badan Pusat Statistik Jawa Barat
- Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2014-2017. Badan Pusat Statistik Jawa Barat
- Ramdhani, febby Randria. 2016. *Analisis kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan tahun 2010-2015*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Malang.
- Saputra, Dori. 2014. *Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Mahardika, I Gusti Ngurah Surya Adi. Sri Artini, Luh Gede. 2012. *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan*. Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Bali.



Dwirandra, A.A.N.B. 2007. *Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2002-2006*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Bali.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan